

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, M. D. (2012). *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Aibak, Kutbuddin. (2017). *Hadits Ahkam Ekonomi*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Al-Bukhari, Imam. t.t., *Shahih al-Bukhari. Kitab al-Ijarah*. Hadist Nomor 2264.
- Al-Qur'an. (n.d.). *Surah At-Thalaq [65]: 6*.
- Aminullah, M. S. (2020). Pengalihan Hak Sewa Tanah Dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah, KUH Perdata dan KHES (Studi Kasus di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang). *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 52–53.
- Ardiyanti, Niken. t.t., *Praktik Pengalihan Hak Sewa Lahan Pertanian Milik Perhutani dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Syariah.
- Arizona, Y., & dkk. (2024). The Constitutional Court and Forest Tenure Conflicts in Indonesia. *Journal of Indonesian Constitutional Law atau Jurnal Konstitusi*, 75.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Besole, A. K. (2025, Oktober 17). Wawancara lapangan dengan anggota Kelompok Petani Hutan Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

- Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia. (2025, Oktober 29) *Fatwa Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah*, 19 Sep 2017. PDF. [ubico.id](https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/112-Akad-Ijarah.pdf). <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/112-Akad-Ijarah.pdf>
- DSN-MUI. *Fatwa Nomor 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah*.
- Fajar, M. N., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, K. L. (2021). *Panduan Implementasi Perhutanan Sosial*. Jakarta: KLHK.
- Indonesia, K. L. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Jakarta.
- Indonesia, K. L. (2023). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Jakarta.
- Indonesia, K. L. (2024, September 11). *Prinsip Kelola Hutan Berkelanjutan: Integrasikan Seluruh Jasa Ekosistem hingga Aspek Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat*. Retrieved from KLHK: <https://www.menlhk.go.id/berita/prinsip-kelola-hutan-berkelanjutan>

- Indonesia, P. R. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
- Indonesia, P. R. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kehutanan Sosial*. Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
- Indonesia. M. L. K. (2017). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
- Kehutanan, K. L. (2018). SK Menteri LHK Nomor 8490/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tentang Pemberian IPHPS kepada KTH Argo Makmur Lestari Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kehutanan, K. L. (2021). Panduan Implementasi Perhutanan Sosial. Jakarta: KLHK
- Lateef, A. W., Alawiye, A. A., Syahirah, A. S., & Amalina, A. T. (2017). Maqasid Al-Shari'ah in Ijarah (Leasing) Contract of Islamic Banking System. *Journal of Islamic Finance*, 38–44.
- Lubis, R. H., & Pradini, A. Y. (2024). Critical Review of Changes from Classical to Contemporary Contracts in Sharia Economic Transactions: Fiqh Perspective. *Jurnal Syarah*, 1–20.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mudjib, Abdul. (2005) *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muslan. (2025). Wawancara Pribadi. Tulungagung.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nike. (2025). Wawancara Pribadi. Tulungagung.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan dengan Pengelola Khusus
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*. (2021) Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 Tentang Kehutanan Sosial
- Permadi, I. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Petani Penggarap Tanah dalam Kawasan Perhutani. *Arena Hukum*, 104.
- Permana, I. (2020). *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah.
- Prastio, Sigit. (2023). “*Pengalihan Sewa Tanah Perhutani oleh Petani Kapulaga Perspektif Hukum Ekonomi (Studi Kasus di Desa Gununglurah Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyumas)*” (Skripsi, Universitas Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah)
- Sabiq, S. (2021). *Fiqh Sunnah*. Jakarta Pusat: Yayasan Syi’ar Islam Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukiran. (2025). Wawancara Pribadi. Tulungagung.
- Syarifuddin, Amir. (2005). *Garis-garis Besar Fiqh Islam, Jilid II*. (Jakarta: Prenada Media).
- Tanahkita.id. (2025, 2025 16). *Data Wilayah Kelola Desa Besole*. Retrieved from Tanahkita.id: <https://tanahkita.id>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Wati, M. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Milik Perhutani (Studi Kasus di Desa Gesengan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati). *Skripsi*, 20.
- Widiyanto. (2025). *Pemanfaatan Lahan Perhutani di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Akad Ijarah*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah)

- Wulandari, C., & dkk. (2021). Complexity of Unsolved Forest Tenurial Conflict: A Case of Way Terusan Forest Management Unit, Lampung Province, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27.
- Yusro, Alfin Alfina. (2021). *Praktik Pengalihan Hak Pengelolaan atas Tanah Menurut Hukum Islam (Studi di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah)